

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara berbentuk kesatuan yang memiliki prinsip musyawarah, mufakat, dan perwakilan sebagai landasan terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghasilkan rakyat yang berdaulat.¹ Penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.”² Sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia sebagai negara kesatuan adalah sistem desentralisasi, yaitu urusan pemerintah pusat yang bersifat tidak pokok diserahkan ke pemerintah otonom atau daerah.³

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Kabupaten Tanah Datar tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari pada pasal

¹ Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2.

² Simandjuntak, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Jurnal Syarian dah Hukum, Vol. 7, No.1, 2015

³ Mahmuzar, *Model Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.2, 2020.

1 dijelaskan bahwasanya wali nagari dipilih oleh penduduk nagari dan warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dan merupakan penduduk nagari. Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Tanah Datar dan bersifat terbuka, bebas, tertutup, jujur, dan adil.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang sering disebut BPRN adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan. Anggotanya dipilih secara demokratis dan menjabat sebagai wakil penduduk nagari berdasarkan keterwakilan daerah. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) mengadakan musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Nagari yang secara tegas memilih Wali Nagari. Tahapan pemilihan adalah jangka waktu sejak Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) menerima pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sampai dengan pengambilan sumpah Wali Nagari terpilih. BPRN juga membentuk panitia Pemilihan Wali Nagari.⁴

Dengan membahas berbagai permasalahan, mulai dari kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari hingga peristiwa yang terjadi di luar lingkungan sosial, komunikasi sebagai aktivitas sosial tidak hanya menjadi jembatan bagi para pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan namun juga di tingkat bawah. Salah satu cara masyarakat berpartisipasi dalam memikirkan dan menjadi bagian dari suatu masyarakat adalah dengan membicarakan permasalahan yang mereka lihat dan dengar. Akibatnya, komunikasi berfungsi

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari

sebagai penghubung antara kebutuhan individu manusia dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.⁵

Model perencanaan komunikasi yang dibuat oleh Philip Lesly terdiri dari atas dua komponen utama, yakni organisasi yang menggerakkan kegiatan dan publik yang menjadi sasaran kegiatan. Pada komponen organisasi terdapat enam tahapan, sedangkan dalam komponen publik terdapat dua tahapan yang harus dilakukan seorang perencana komunikasi. Tahapan model perencanaan komunikasi Philip Lesley adalah analisis dan penelitian, pengembangan kebijakan, perencanaan komunikasi, pelaksanaan perencanaan komunikasi (kegiatan komunikasi), umpan balik dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan terakhir evaluasi pelaksanaan kegiatan.⁶

Wali nagari merupakan pemegang otoritas utama dalam pemerintahan nagari, sehingga perlu memiliki kemampuan inovatif dan inisiatif dalam memimpin nagarnya. Pembangunan nagari sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan nagari merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan adanya pemimpin formal yang berfungsi mendorong dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nagari.

Sebagai pemimpin resmi nagari, Wali nagari mengawasi pembangunan sosial, pemerintahan, dan administrasi perekonomian. Untuk meningkatkan

⁵ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.63

⁶ Hafied Cangara, *Perencanaan & Strategi Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 70

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, maka wali nagari harus mampu berperan sebagai motivator, komunikator, dan mampu membina kelompok masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan tidak ada gunanya dan kemampuannya untuk mencapai tujuannya tidak lagi terjamin. Pembangunan tidak akan ada gunanya jika masyarakat tidak dilibatkan atau didukung karena tidak akan berhasil.⁷

Nagari III KOTO adalah salah satu nagari di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari III KOTO: 25,76 kilometer persegi atau 19,95 persen dari luas wilayah Kecamatan Rambatan. Nagari III Koto berjarak 8 kilometer dari ibukota Kecamatan Rambatan dan 15 kilometer dari ibu kota kabupaten Batusangkar. Dinamakan Nagari III KOTO karna terbagi atas tiga KOTO yaitu, KOTO Galogandang, KOTO Turawan, dan KOTO Padang Lua. Nagari III KOTO terdiri dari 10 Jorong yakni; Jorong Kalumpang, Jorong Ganting, Jorong Turawan, Jorong Galogandang, Jorong Guguk Jambu, Jorong Pasir Jaya, Jorong Siturah, Jorong Bonai, Jorong Aur Sarumpun, dan Jorong Panta.

Berkaitan dengan diatas, upaya komunikasi yang efektif dan model perencanaan komunikasi yang diterapkan di oleh Wali Nagari III KOTO, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini peran komunikasi Wali Nagari III KOTO merupakan salah satu faktor yang mampu mendongkrak kesadaran masyarakat di Nagari III KOTO untuk terus berkarya dalam meningkatkan pembangunan Nagari.

⁷ Dapaertemen Dalam Negeri, *Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1996) h. 59

Model perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Wali Nagari III KOTO dengan cara berbaur dengan masyarakat nagari. Setiap bulan di nagari tersebut selalu melakukan wirid di masing-masing jorong dan KOTO. Selaku Wali Nagari beliau tidak pernah absen dalam wirid tersebut walaupun sudah seharian berkerja di kantor ia tetap menyempatkan hadir dalam wirid tersebut. Setelah wirid pak wali nagari tidak langsung pulang begitu saja, namun ia berdiskusi dengan masyarakat di jorong tersebut. Bersama pak jorong dan beberapa masyarakat disana. Topik pembahasannya mengenai apa saja yang dirasa perlu dibenahi di jorong tersebut. Salah satunya adalah program unggul dari Bupati Tanah Dataryaitu “Satu Rumah Satu Hafizh”. Untuk mensukseskan program unggulan tersebut di Nagari III KOTO sudah banyak rumah tahfiz yang di bangun hampir seluruh jorong sudah mempunyai rumah tahfiz. Namun di Jorong Kalumpang masih dalam pembangunan, dan masih kurang dana untuk hal tersebut. Ketika wirid yang dilakukan di Jorong Kalumpang, pak jorong dan warga Jorong Kalumpang menyampaikan hal tersebut kepada pak wali nagari, agar anak-anak di Jorong Kalumpang tidak perlu jauh-jauh lagi pergi kerumah tahfiz di Jorong Galogandang. Dengan itu pak wali langsung merespon cepat keluhan dari warganya, pak wali langsung menghubungi para perantau-perantau dari Nagari III KOTO terutama warga Jorong Kalumpang.

Tidak hanya itu ketika ada latihan di salah satu sanggar seni yang ada di nagari tersebut tepatnya di Jorong Siturah. Setiap malam minggu tepatnya dilapangan bola volly, sanggar seni tersebut melakukan latihan. Latihannya terdiri dari menari, randai, atraksi injak paku, dan berdendang. Pada saat latihan

tiba-tiba pak wali nagari beserta staf di wali nagari hadir ke sanggar tersebut untuk memberikan dukungan kepada anak-anak sanggar yang sedang latihan. Dari 10 jorong tinggal beberapa sanggar yang aktif, salah satunya sanggar Jorong Siturah yang baru saja diaktifkan kembali oleh kepala jorongnya. Dulunya sanggar ini cukup aktif dan sering diundang diberbagai kegiatan, namun sudah kurang lebih 1 tahun vakum karena kekurangan anggota dan juga Covid-19.

Karena sudah cukup lama vakum pak wali nagari memberikan sebuah ide untuk mengembangkan kembali sanggar di jorong Siturah dengan cara mempromosikan sanggar Siturah kepada masyarakat Nagari III KOTO dan juga kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Agar makin banyak nantinya yang bergabung dengan sanggar tersebut. Karna promosi yang dilakukan tadi, pada akhirnya sanggar Siturah diundang pada event atau acara di Kabupaten Tanah Datar. Sanggar Siturah juga diundang pada Event Alek Pacu Jawi yang mana merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Datar Luhak Nan Tuo.

Sebelum memperingati 17 Agustus, pak wali juga berkeliling nagari III KOTO guna melihat persiapan masing-masing jorong untuk memperingat hari kemerdekaan yang ke-77. Saat itu pak wali nagari melihat semak-semak yang sudah cukup tinggi di jorong Turawan. Apa lagi jorong Turawan adalah Pintu masuk yang akan dilewati apabila kita ingin masuk ke Nagari III KOTO. Pak wali langsung mengintruksikan kepada jorong Turawan untuk melakukan gotong royong di lokasi yang semak-semaknya sudah cukup tinggi. Karena

takut ada hewan buas dan juga agar terlihat bersih, maka hari minggunya warga jorong turawan beserta mahasiswa KKN UIN Imam Bonjol langsung melaksanakan gotong royong.

Penelitian tentang model perencanaan komunikasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mutiara Nizam dalam penelitiannya “Perencanaan Komunikasi Corporate Social Responsibility Pertamina RU II Sei Pakning dalam Pengembangan Ekowisata Arboretum Gambut.” menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi dilakukan dengan tahapan analisis masalah dan riset dengan menggunakan teknik pemetaan sosial dengan berlandaskan pada sistem tata kelola organisasi dengan berdasarkan kebijakan perusahaan. Kegiatan komunikasi diimplementasikan juga dengan baik yaitu dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat berupa kegiatan yang dapat menunjang ekonomi masyarakat, terutama pengembangan objek wisata arboretum yang berbasis pada pendidikan lingkungan. Pengembangan objek wisata ini mengedukasi masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan ekosistem gambut agar terhindar dari bencana kebakaran dan kekeringan. Dalam hal ini, model perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh CSR Pertamina dalam mengembangkan ekowisata gambut berbeda dari Philip Lesly. Selain itu, model yang diterapkan juga lebih sederhana dan aplikatif.

Budiman Purba, Eddy Iskandar & Suardi dalam penelitiannya “Model Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kecamatan Padang Tualang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.” Menyatakan bahwa kerangka teori yang

digunakan adalah perencanaan komunikasi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perencanaan komunikasi pemerintahan kecamatan padang tualang dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan memiliki unsur-unsur yang terdapat pada model Assifi dan French, Middleton dan Proses. Dalam tahap pelaksanaannya keseluruhan proses komunikasi, dimulai dari perencanaan pemecahan masalah, perencanaan khalayak sasaran, perencanaan tujuan, perencanaan saluran komunikasi, dan evaluasi implementasi perencanaan.

Menurut penelitian Kurnia Bagus Aditya, “Model Perencanaan Humas Polres Sukoharjo Dalam Membangun Citra Dengan Sosialisasi Vaksin Covid-19 Melalui Media Sosial Instagram.” Dengan menginformasikan kepada warga Kabupaten Sukoharjo tentang vaksin Covid-19 melalui Instagram, Polres Sukoharjo telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi komunikasi dengan masyarakat umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas bagaimana Model Perencanaan Komunikasi Humas Polres Sukoharjo dapat digunakan untuk menciptakan image pada saat vaksinasi Covid-19 disebarkan melalui media sosial Instagram. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Sedangkan wawancara dan dokumentasi digunakan dalam proses pengumpulan data. Metodologi perencanaan komunikasi Humas Polres Sukoharjo dalam menyampaikan informasi efektif sesuai temuan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model perencanaan komunikasi humas Polres Sukoharjo dalam menyebarkan informasi vaksin Covid19 di instagram menggunakan teori lima langkah, yaitu *research, plan, execute, measure, report*. Selain itu citra yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut terkesan baik dimata masyarakat terkait kinerja humas Polres Sukoharjo.

Mutia Dewi dan M. Masri Hadiwijaya dalam penelitiannya “Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kota Palembang dalam Kampanye Program Palembang EMAS (Elok, Madani, Aman, Sejahtera)” menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan asisten pemerintah bidang Humas dan protokol, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kota Palembang, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Studi ini menemukan bahwa perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam kampanye Palembang EMAS dilakukan melibatkan dua hal pokok, yaitu (1) organisasi yang menggerakkan kegiatan dalam hal ini pemerintah Kota dengan melakukan analisis dan riset, perumusan kebijakan, perencanaan program pelaksanaan dan kegiatan komunikasi; (2) publik yang menjadi sasaran kegiatan yang terdiri atas respon dan evaluasi dari masyarakat.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara,

dokumentasi dan observasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada subjek kajiannya, lokasi penelitian dan fokus dari penelitian sebelumnya adalah kepada organisasi penggerak. Pada penelitian saat ini fokusnya kepada organisasi penggerak dan publik yang menjadi sasaran.

Bedasarkan kajian dalam latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul “Model Perencanaan Komunikasi Wali Nagari Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Proses Pembangunan (di Nagari III KOTO, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Bagaimana model perencanaan komunikasi wali nagari dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nagari (di Nagari III KOTO, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar)? merupakan rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut di atas.

2. Batasan Masalah

1. Bagaimana analisis dan riset wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan nagari di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?

2. Bagaimana perumusan kebijakan wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana perencanaan komunikasi wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?
4. Bagaimana implementasi perencanaan komunikasi (kegiatan komunikasi) wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?
5. Bagaimana umpan balik dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar? dilihat dari publik yang menjadi sasaran kegiatan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti di sini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan analisis dan riset wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan nagari di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?
2. Untuk mendeskripsikan perumusan kebijakan wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?

3. Untuk mendeskripsikan rencana komunikasi wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?
4. Untuk mendeskripsikan implementasi perencanaan komunikasi (kegiatan komunikasi) wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar?
5. Untuk mendeskripsikan umpan balik dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di Nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar? dilihat dari publik yang menjadi sasaran kegiatan.

Adapun manfaat dari ini adalah:

a. Manfaat Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan kontribusi positif tentang ilmu perencanaan komunikasi khususnya bagi mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
- 2) Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
- 3) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan bagi yang mempunyai keinginan untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi UIN Imam Bonjol Padang.
- 2) Temuan-temuan yang ada diharapkan dapat menambah bacaan memperkaya wawasan dalam rangka pengembangan keilmuan Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- 3) Temuan-temuan yang didapat diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.

D. Penjelasan Judul

Penjelasan judul dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami kata-kata yang penulis gunakan dalam penelitian, maka penulis menjelaskan judul yang terdapat dalam penelitian ini:

Perencanaan :Sebuah kegiatan mengorganisir dan

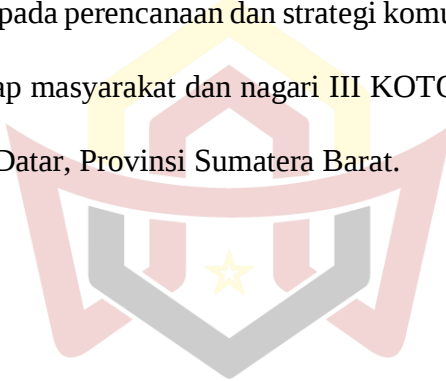
Komunikasi mempersiapkan proses komunikasi yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan.

Wali Nagari :Seorang yang memimpin di wilayah pemerintahan Nagari. Wali Nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Pembangunan : Serangkaian inisiatif yang dibuat di wilayah Nagari dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat nagari dan meningkatkan

kesejahteraannya melalui rencana yang dibuat sebagai tanggapan terhadap diskusi masyarakat.

Model Perencanaan Komunikasi yang penulis maksud adalah perencanaan atau planning yang dilakukan wali nagari III KOTO untuk mencapai suatu tujuan yaitu membangun nagari III KOTO. Dimana penelitian ini mencangkup kepada perencanaan dan strategi komunikasi yang dilaksanakan wali nagari terhadap masyarakat dan nagari III KOTO Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG